

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menjawab masalah yang dirumuskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Besar Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Sleman tahun 2010 adalah 73,64%, sedangkan di tahun 2011 sebesar 75,74%. Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sebesar Rp 59.959.850.875, 00 sedangkan di tahun 2011 sebesar Rp 61.080.005.099, 00. Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp 1.048.154.224, 00
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan antara lain:
 - a. Penyuluhan
 - b. Pengawasan
 - c. Kerjasama antar instansi
 - d. Kenaikan potensi Pajak Bumi dan Bangunan.
 - e. Himbauan SPPT kepada Wajib Pajak
 - f. Kesadaran Wajib Pajak
 - g. Kepemilikan tanah di Sleman
 - h. Kemampuan petugas lapangan masih terbatas

- i. Adanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- j. Keberatan dari Wajib Pajak

B. Saran

Dari berbagai uraian tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran – saran yang mungkin membantu pihak- pihak yang berwenang dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Bagi Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat Sleman agar lebih ditingkatkan, perekrutan petugas lapangan yang berkualitas terkait pemungutan PBB agar setoran PBB tidak diselewengkan. Pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar lebih dipercepat supaya target penerimaan bisa dicapai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Sri S, Valentina. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Suandy, Erly. (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Tim LPEM FEUI. (2000). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*.
Jakarta

Undang- undang No. 012 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang- undang
No. 012 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.